

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari ;

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Neraca Saldo;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- (f) Catatan atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

Makassar, Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

ANDIARWIN AZIS, S.STP.,M.M.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19760105 199511 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
NERACA SALDO TAHUN ANGGARAN 2023	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023	
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2023	
NERACA TAHUN ANGGARAN 2023	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Laporan Realisasi Anggaran	1
1.2 Neraca	1
1.3 Laporan Operasional.....	2
1.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	7
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target	11
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	12
3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul	48
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	49
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sul Sel	49
4.2 Visi dan Misi	49
4.3 Organisasi dan Kelembagaan	52
4.4 Sumber Daya SKPD	53
4.5 Program dan Kegiatan SKPD.....	55
BAB V PENUTUP	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1) Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
- 2) Laporan Rincian Realisasi
- 3) Kertas Kerja Belanja Operasi
- 4) Kertas Kerja Aset Tetap
- 5) Register Penutupan Kas
- 6) Rekening Koran
- 7) Bukti Setoran
- 8) Daftar Utang
- 9) Rekap Pajak
- 10) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 255 yang menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenterman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan pada pasal 256 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka untuk memenuhi pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028.

4.2 Visi Dan Misi

Pernyataan Visi merupakan cita-cita dan pandangan yang ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurung waktu 5 (lima) Tahun yakni 2019-2024 yaitu bagaimana dan kemana organisasi dibawa agar dapat eksis berkarya, konsisten, inovatif, antisipatif serta proaktif. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena terkini dan masa depan sejalan dengan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Provinsi Sulawesi Selatan yakni **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** untuk mendukung Visi tersebut maka *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi sebagai berikut :*

“Terwujudnya Ketenteraman dalam Melindungi Kehidupan Masyarakat Serta Supremasi Hukum Melalui Akselerasi Pembangunan Nasional dengan Pendekatan Kearifan Lokal”

Terwujudnya Ketenteraman dalam melindungi kehidupan masyarakat adalah gambaran rasa aman dalam mewujudkan berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan terutama ketahanan budaya dan ketahanan ekonomi sehingga melahirkan budaya tertib, tenteram dan damai dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum melalui akselerasi pembangunan nasional, bahwa salah satu sumber daya yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah Supremasi Hukum, ini memberikan arti bahwa seseorang dikatakan beretika, bermoral, bermartabat, beradab, berahlak dan amanah apabila seseorang telah diuji oleh hukum sehingga akselerasi bidang-bidang pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi yang kita laksanakan hendaknya berkeadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kearifan Lokal, adalah bahgia yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah sejalan dengan lingkungan strategi yang begitu cepat dan sulit untuk diprediksi, maka salah satu piranti yang utama untuk kita lestarikan adaJah kebudayaan lokal (indegenius knoligius) melalui budaya leluhur bangsa kita sebagai landasan pembangunan yang arif dan bijaksana seperti : **"Siri Napacce, Sipatuo Sipatokkong, Reso Temmanginggi namalomo naletei pammase dewata dan Misakada dipatuo pantakada dipomate"**.

Semuanya ini memberikan arti dalam memicu pembangunan di Sulawesi Selatan sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap provinsi lain dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pernyataan Misi

Untuk mencapai pemyataan Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan atas Visi yang ingin dicapai dalam organisasi sekaligus menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasi. Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan kedalam Misi yang harus dilaksanakan, yang selanjutnya diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh seluruh jajaran aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- ❖ *Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;*
- ❖ *Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;*
- ❖ *Mewujudkan Perlindungan Kehidupan Masyarakat.*

Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah yang kuat dan beribawa merupakan suatu keniscayaan, hal ini terutama disebabkan oleh kuatnya tekanan masyarakat untuk memberikan persuasif kontrol sehingga pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang mampu menyediakan pelayanan guna memenuhi hak dasar masyarakat seperti Penegakan Perda dan Pergub serta mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam upaya-upaya melaksanakan fungsi Perlindungan kehidupan masyarakat.

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menegakkan supremasi hukum secara konsisten melalui Penegakan Perda dan Pergub untuk menjamin rasa keadilan, kebenaran dan perlindungan HAM;
- 2) Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang sadar akan pentingnya rasa aman, tentram dan damai;
- 4) Terwujudnya perlindungan kehidupan masyarakat.

STRATEGI

Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana Kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun kedepan.

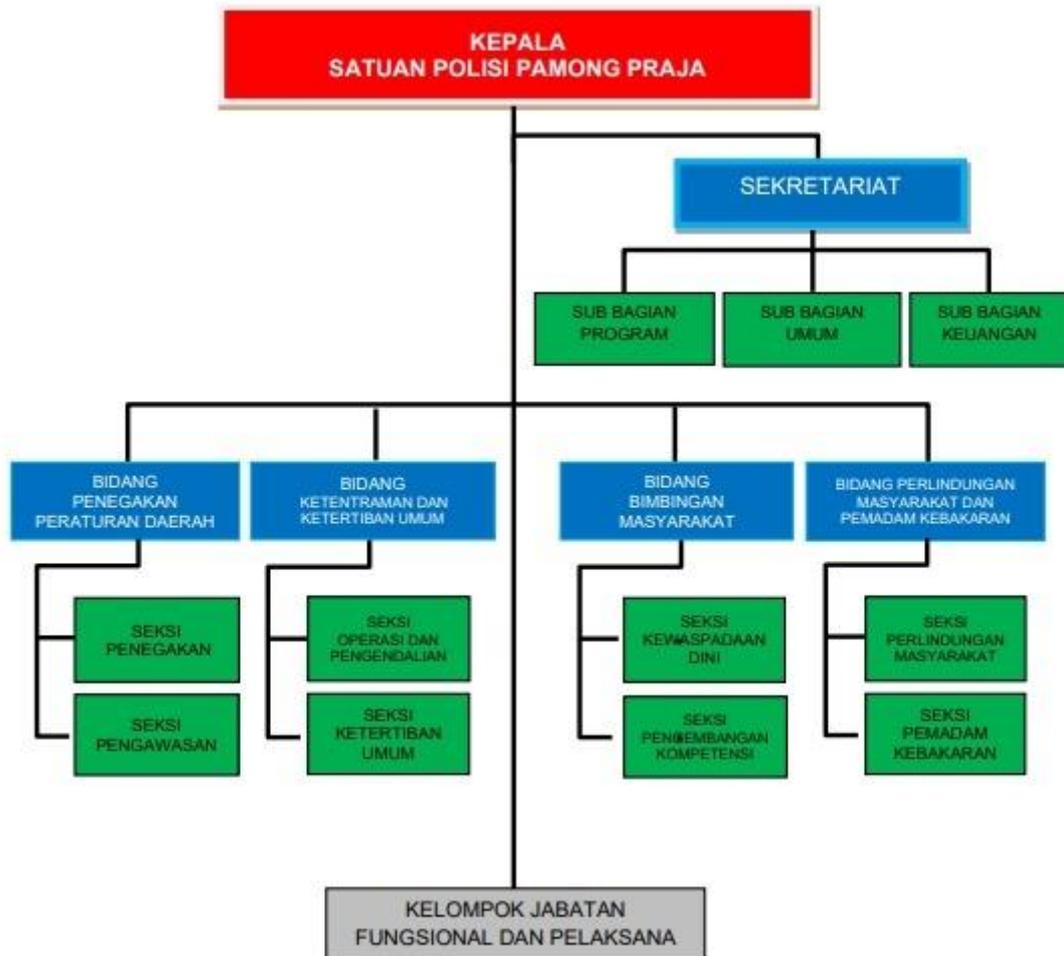
Sasaran strategi yang ditetapkan adalah :

- ❖ *Mewujudkan Supremasi Hukum;*
- ❖ *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;*
- ❖ *Meningkatnya Ketenteraman dan Kenyamanan Dalam Masyarakat;*
- ❖ *Meningkatnya Perlindungan Kehidupan Masyarakat.*

4.3 Organisasi dan Kelembagaan

Untuk mencapai visi dan tujuan strategis tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan masih mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mana ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Program.
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
 - a. Seksi Penegakan.
 - b. Seksi Pengawasan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
5. Bidang Bimbingan Masyarakat.
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini.
 - b. Seksi Pengembangan Kompetensi.
6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
7. Jabatan Fungsional.



4.4 Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 146 orang terdiri dari:

1. Eselon II berjumlah 1 orang pegawai;
2. Eselon III berjumlah 5 orang pegawai;
3. Eselon IV berjumlah 11 orang pegawai;
4. Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) berjumlah 69 orang pegawai.
5. Fungsional Pelaksana (Staf) berjumlah 58 orang pegawai;
6. Golongan IV berjumlah 25 orang pegawai;
7. Golongan III berjumlah 98 orang pegawai;
8. Golongan II berjumlah 22 orang pegawai;
9. Golongan I berjumlah 1 orang pegawai.

Jumlah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 476 orang terdiri dari:

1. 135 orang bertugas di Kantor Gubernur Prov Sul Sel;
2. 36 orang bertugas di Rujab Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda;
3. 6 orang bertugas di Kantor Badan Sianga Bencana;
4. 6 orang bertugas di Kantor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. 6 orang bertugas di Kantor Darma Wanita;
6. 24 orang bertugas di Lego – lego;
7. 59 orang bertugas di Kantor DPRD Provinsi Sul Sel;
8. 7 orang bertugas di Kantor Inspektorat;
9. 61 orang bertugas di Kantor Bapenda;
10. 3 orang bertugas di UPT Dinsos;
11. 19 orang bertugas di Kantor Dinas PUTR;
12. 8 orang bertugas di Kantor Dinas Perkimtan;
13. 8 orang bertugas di Kantor Dispora;
14. 12 orang bertugas di Kantor Dinas BPSDM;
15. 8 orang bertugas di Kantor Dinas ESDM;
16. 33 orang bertugas di Kantor Dinas Pariwisata;
17. 30 orang bertugas di Kantor Dinas Pertanian;
18. 9 orang bertugas di Kantor Dinas Perternakan;
19. 6 orang bertugas di Kantor Dinas PTSP.

4.5 Program dan Kegiatan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH **PROVINSI**

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Kegiatan Penegakan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

- a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

3. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

- a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

4. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

- a. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

IV. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 per 30 Desember 2023

Makassar, Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

ANDLARWIN AZIS, S.STP.,M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19760105 199511 1 001

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN

3.1.1 PENDAPATAN - LRA

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
19.620.000,00	21.325.900,00	23.477.500,00

Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar **Rp. 19.620.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 21.325.900,00** atau **108,69%**. Terdapat Penurunan capaian dari Tahun 2022 sebesar **Rp. 2.151.600,-**. Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Retribusi Daerah	19.620.000,00	21.183.500,00	107,97	23.400.000,00
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	142.400,00		77.500,00
Jumlah		19.620.000,00	21.325.900,00	108,69	23.477.500,00

3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
19.620.000,00	21.183.500,00	23.400.000,00

Pada Pendapatan Retribusi Daerah T.A. 2023 yang direncanakan sebesar **Rp. 19.620.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 21.183.500,00** atau **107,97%**, mencapai target pendapatan. Anggaran di Tahun 2023 berbeda dengan Anggaran

di Tahun 2022. Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp. 23.400.000,00,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 23.400.000,00,-** atau **100%** Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Retribusi Daerah	19.620.000,00	21.183.500,00	107,97	23.400.000,00
Jumlah		19.620.000,00	21.183.500,00	107,97	23.400.000,00

Pada Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 Pendapatan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar **Rp. 19.620.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 21.183.500,00** atau **107,97%**, memenuhi Target Pendapatan.

3.1.1.2 Lain – lain Pendapatan yang Sah - LRA

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
-	142.400,00	77.500,00

Pada Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 terdapat Lain – lain Pendapatan yang Sah yaitu Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar **Rp. 142.400,00,-** .

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	142.400,00	77.500,00
Jumlah		-	142.400,00	77.500,00

3.1.2 BELANJA - LRA

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
50.781.622.592,00	49.839.355.842,00	43.964.272.865,00

Belanja Daerah direncanakan sebesar **Rp. 50.781.622.592,00** sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 49.839.355.842,00** atau **98,14%** Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 942.266.750,00,-** Sedangkan realisasi T.A. 2022 sebesar **Rp. 43.964.272.865,00**. Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	50.468.466.592,00	49.561.022.842,00	98,20	43.730.425.029,00
2	Belanja Modal	313.156.000,00	278.333.000,00	88,88	233.847.836,00
Jumlah		50.781.622.592,00	49.839.355.842,00	98,14	43.964.272.865,00

3.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
50.468.466.592,00	49.561.022.842,00	43.730.425.029,00

Pada Belanja Operasi, direncanakan sebesar Rp. 50.468.466.592,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 49.561.022.842,00 atau 98,20 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 907.443.750,00.

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	22.365.721.246,00	22.263.314.243,00	99,54	19.986.391.857,00
2	Belanja Barang dan Jasa	28.102.745.346,00	27.297.708.599,00	97,14	23.744.033.172,00
Jumlah		50.468.466.592,00	49.561.022.842,00	98,20	43.730.425.029,00

A. Belanja Pegawai

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
22.365.721.246,00	22.263.314.243,00	19.986.391.857,00

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 22.365.721.246,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.263.314.243,00 atau 99,54%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 102.407.003,00. Sedangkan realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 19.986.391.857,00. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	9.815.406.768,00	9.761.756.175,00	99,45	9.619.967.254,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.404.029.928,00	12.355.273.518,00	99,61	10.366.424.603,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	146.284.550,00	146.284.550,00	100	-
Jumlah		22.365.721.246,00	22.263.314.243,00	99,54	19.986.391.857,00

Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
28.102.745.346,00	27.297.708.599,00	23.744.033.172,00

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 28.102.745.346,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.297.708.599,00 atau 97,14%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 805.036.747,00. Sedangkan realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 23.744.033.172,00,-. Rincian Realisasi Barang dan Jasa sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang	3.386.700.050,00	3.031.157.638,00	89,50	2.259.013.688,00
2	Belanja Jasa	22.778.385.896,00	22.478.225.662,00	98,68	20.716.370.363,00
3	Belanja Pemeliharaan	366.750.000,00	365.400.000,00	99,63	25.890.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.570.909.400,00	1.422.925.299,00	90,58	742.759.121,00
Jumlah		28.102.745.346,00	27.297.708.599,00	97,14	23.744.033.172,00

a. Belanja Barang

Pada T.A 2023 Belanja Barang direncanakan sebesar Rp. 3.386.700.050,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.031.157.638,- atau sebesar 89,50 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 355.542.412,-. Rincian Belanja Barang terdiri dari:

No	Jenis Belanja Barang Pakai Habis	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	397.966.500,00	227.342.418,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.193.500,00	4.441.400,00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	165.321.277,00	108.138.880,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.466.446,00	89.835.600,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.387.400,00	-
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	117.972.400,00	63.927.400,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.015.000,00	4.200.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.844.500,00	2.012.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.348.500,00	2.045.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.580.250,00	2.242.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	48.000.000,00	
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.380.000,00	
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	504.287.000,00	376.940.000,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.503.500,00	12.304.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.401.986.400,00	1.253.520.000,00
16	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.878.500,00	
17	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	94.884.465,00	
18	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.239.000,00	
19	Belanja Pakaian Olahraga	21.903.000,00	
20	Belanja Pakaian KORPRI	-	112.064.490,00
Jumlah		3.031.157.638,00	2.259.013.688,00

b. Belanja Jasa

Pada T.A 2023 Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 22.778.385.896,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.478.225.662,- atau sebesar 98,68 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 300.160.234,-. Rincian Belanja Jasa terdiri dari:

No	Jenis Belanja Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	135.300.000,00	46.700.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.236.846.425,00	19.299.180.096,00
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54.000.000,00	104.000.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	121.865.220,00	104.473.908,00
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	360.600.000,00	360.000.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.621.740,00	56.985.768,00
7	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	5.000.000,00	-
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	549.350.000,00	-
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	159.165.000,00	-
10	Belanja Tagihan Telepon	115.571,00	421.423,00
11	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.520.000,00	18.170.000,00
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.429.000,00	11.775.204,00
13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.508.500,00	24.766.700,00
14	Belanja Lembur	17.047.000,00	-
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	806.666.148,00	628.412.864,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	34.344.000,00	27.326.400,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	42.930.000,00	34.158.000,00
18	Belanja Sewa Electric Generating Set	39.880.000,00	-
19	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2.400.000,00	-
20	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	262.616.058,00	-
21	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	175.500.000,00	-
22	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	190.771.000,00	-
23	Belanja Sewa Mebel	82.500.000,00	-
24	Belanja Sewa Audio Visual	62.500.000,00	-
25	Belanja Diklat Kepemimpinan	42.750.000,00	-
Jumlah		22.478.225.662,00	20.716.370.363,00

c. Belanja Pemeliharaan

Pada T.A 2023 Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 366.750.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 365,400,000,- atau sebesar 99,63 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.350.000,-. Rincian Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

No	Jenis Belanja Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	6.850.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.130.000,00	7.670.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.100.000,00	11.370.000,00
4	Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	349.170.000,00	-
Jumlah		365.400.000,00	25.890.000,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Pada T.A 2023 Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp. 1.570.909.400,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.422.925.299,- atau sebesar 90,58 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 147.984.101,-. Rincian Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

No	Jenis Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.356.105.299,00	641.329.121,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.820.000,00	101.430.000,00
Jumlah		1.422.925.299,00	742.759.121,00

3.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
313.156.000,00	278.333.000,00	233.847.836,00

Pada Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 313.156.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 278.333.000,00,- atau 88,88%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.823.000,00, Sedangkan realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 233.847.836,00 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.156.000,00	278.333.000,00	88,88	184.110.190,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0	49.737.646,00
Jumlah		313.156.000,00	278.333.000,00	88,88	233.847.836,00

A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
313.156.000,00	278.333.000,00	184.110.190,00

Belanja Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 313.156.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 278.333.000,00 atau 88,88%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.823.000,00 sedangkan realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 184.110.190,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.250.000,00	7.995.000,00	96,91	23.045.000,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	24.906.000,00	24.800.000,00	99,57	9.855.000,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	27.600.000,00
4	Belanja Modal Komputer	130.000.000,00	96.538.000,00	74,26	106.821.190,00
5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	16.789.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Olahraga	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	-
Jumlah		313.156.000,00	278.333.000,00	88,88	184.110.190,00

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	Realisasi
-	-	49.737.646,00

Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk T.A. 2023. Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan T.A. 2022 sebesar **Rp. 49.737.646,00,-**.

Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0	49.737.646,00
Jumlah		-	-	0	49.737.646,00

LAPORAN OPERASIONAL

3.1.3 PENDAPATAN - LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
21.325.900,00	23.477.500,00	(2.151.600,00)

Pada T.A. 2023, Pendapatan Daerah - LO sebesar **Rp. 21.325.900,00**. Terdapat penurunan capaian dari Tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.151.600,-. Informasi tentang rincian dan penjelasan Pos Pendapatan - LO yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Pendapatan Retribusi Daerah	21.183.500,00	23.400.000,00	(2.216.500,00)
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	142.400,00	77.500,00	64.900,00
Jumlah		21.325.900,00	23.477.500,00	(2.151.600,00)

A. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Pendapatan Retribusi Daerah	21.183.500,00	23.400.000,00	(2.216.500,00)
Jumlah		21.183.500,00	23.400.000,00	(2.216.500,00)

Pada Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp. 21.183.500,00**. Terdapat penurunan capaian sebesar Rp. 2.216.500,- dari Tahun 2022

B. Lain – lain Pendapatan yang Sah - LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Lain-lain PAD yang Sah	142.400,00	77.500,00	64.900,00
Jumlah		142.400,00	77.500,00	64.900,00

Pada Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 terdapat Lain – lain Pendapatan yang Sah yaitu Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar **Rp. 142.400,00,-**. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 64.900,- dari Tahun 2022.

3.1.4 BEBAN - LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
50.940.339.862,64	43.823.158.278,56	7.117.181.584,08

Pada T.A. 2023 Beban sebesar **Rp. 59.940.339.862,64,-** terdapat penurunan sebesar Rp. 7.117.181.584,08 dari Tahun 2022,-. Rincian Beban T.A. 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Beban - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Operasi	49.888.110.040,00	42.398.627.888,00	7.489.482.152,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.052.229.822,64	1.424.530.390,56	(372.300.567,92)
Jumlah		50.940.339.862,64	43.823.158.278,56	7.117.181.584,08

A. Beban Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
49.888.110.040,00	42.398.627.888,00	7.489.482.152,00

Beban Operasi pada Satpol PP Prov. Sul Sel Periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. 49.888.110.040,00. Terdapat penurunan sebesar Rp. 7.489.482.152,- dari Tahun 2022. Beban Operasi terdiri dari :

No	Jenis Beban Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Pegawai	22.389.862.462,00	20.096.904.093,00	2.292.958.369,00
2	Beban Barang dan Jasa	27.498.247.578,00	22.301.723.795,00	5.196.523.783,00
Jumlah		49.888.110.040,00	42.398.627.888,00	7.489.482.152,00

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Jenis Beban Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	9.761.756.175,00	9.619.967.254,00	141.788.921,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	12.455.716.443,00	10.476.936.839,00	1.978.779.604,00
3	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	172.389.844,00	-	172.389.844,00
Jumlah		22.389.862.462,00	20.096.904.093,00	2.292.958.369,00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Jenis Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Barang	3.068.684.288,00	2.285.665.488,00	783.018.800,00
2	Beban Jasa	22.641.237.991,00	19.247.409.186,00	3.393.828.805,00
3	Beban Pemeliharaan	365.400.000,00	25.890.000,00	339.510.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas	1.422.925.299,00	742.759.121,00	680.166.178,00
Jumlah		27.498.247.578,00	22.301.723.795,00	5.196.523.783,00

a. Beban Barang

Beban Barang Pakai Habis Per 01 Januari sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. 3.068.684.288,00,- terdiri dari:

No	Beban Pakai Habis	Jumlah
1	BBM	401.590.950,00
2	Bahan Lainnya	1.193.500,00
3	Suku Cadang	165.321.277,00
4	ATK	98.128.446,00
5	Kertas dan Cover	37.345.900,00
6	Bahan Cetak	117.972.400,00
7	Benda Pos	4.615.000,00
8	Bahan Komputer	20.588.100,00
9	Perabot Kantor	4.348.500,00
10	Alat Listrik	10.580.250,00
11	Suvenir/Cendera Mata	48.000.000,00
12	Alat/Bahan utk Keg Kantor Lainnya	10.380.000,00
13	Mamin Rapat	504.287.000,00
14	Mamin Jamuan Tamu	19.503.500,00
15	Mamin Aktivitas Lap	1.420.968.000,00
16	PDL	78.835.000,00
17	PDU	94.884.465,00
18	Pakaian Batik Tradisional	8.239.000,00
19	Pakaian Olahraga	21.903.000,00
Jumlah		3.068.684.288,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa Per 01 Januari sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. 22.641.237.991,00,- terdiri dari:

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Jasa Kantor	21.718.982.247,00	19.247.409.186,00	2.471.573.061,00
2	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	879.505.744,00	-	879.505.744,00
3	Beban Diklat Kepemimpinan	42.750.000,00	-	42.750.000,00
Jumlah		22.641.237.991,00	19.247.409.186,00	3.393.828.805,00

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 01 Januari sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. 365.400.000,00,- terdiri dari:

No	Jenis Beban Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.230.000,00	25.890.000,00	(9.660.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	349.170.000,00	-	349.170.000,00
Jumlah		365.400.000,00	25.890.000,00	339.510.000,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 01 Januari sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. 1.422.925.299,00,- terdiri dari:

No	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.422.925.299,00	742.759.121,00	680.166.178,00
Jumlah		1.422.925.299,00	742.759.121,00	680.166.178,00

B. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Jenis Penyusutan	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / Penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	900.573.162,49	1.276.832.063,72	(376.258.901,23)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	121.790.343,49	121.790.343,50	(0,01)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Mesin	13.436.733,33	13.436.733,34	(0,01)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	16.429.583,33	12.471.250,00	3.958.333,33
Jumlah		1.052.229.822,64	1.424.530.390,56	(372.300.567,92)

NERACA

3.1.5 ASET

30 Desember 2023	30 Desember 2022
12.309.888.923,89	13.017.935.053,96

Pada T.A. 2023 Aset sebesar **Rp. 12.309.888.923,89,-** sedangkan pada T.A. 2022 Aset sebesar **Rp. 13.017.935.053,96,-**. Terdapat penurunan Aset sebesar Rp. 708.046.130,07. Rincian Aset T.A. 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	30 Desember 2023	30 Desember 2022
1	Aset Lancar	2.102.400,00	2.344.700,00
2	Aset Tetap	12.191.802.357,22	12.978.176.603,96
3	Aset Lainnya	115.984.166,67	37.413.750,00
Jumlah		12.309.888.923,89	13.017.935.053,96

3.1.5.1 Aset Lancar

30 Desember 2023	30 Desember 2022
2.102.400,00	2.344.700,00

Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sul Sel per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.102.400,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	30 Desember 2023	30 Desember 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	200,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Piutang Lainnya	338.400,00	-
4	Persediaan	1.764.000,00	2.344.500,00
Jumlah		2.102.400,00	2.344.700,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

30 Desember 2023	30 Desember 2022
-	200,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2023 **Rp. 0,00,-**.

Kas di Bendahara Penerimaan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
-	-

Sisa Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2023 **Rp. 0,00,-**.

Piutang Lainnya

30 Desember 2023	30 Desember 2022
338.400,00	-

Piutang Lainnya sebesar **Rp. 338.400,-** merupakan Pembayaran Pajak Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.

Persediaan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
1.764.000,00	2.344.500,00

Persediaan per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.764.000,-** untuk T.A. 2022 sebesar **Rp. 2.344.500,-**. Persediaan terinci sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	30 Desember 2023	30 Desember 2022
1	Persediaan Atk	1.082.500,00	1.744.500,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	681.500,00	-
3	Persediaan Benda Pos	-	600.000,00
Jumlah		1.764.000,00	2.344.500,00

3.1.5.2 Aset Tetap

30 Desember 2023	30 Desember 2022
12.191.802.357,22	12.978.176.603,96

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan dengan Saldo Per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 12.191.802.357,22,-** dan T.A. 2022 sebesar **Rp. 12.978.176.603,96,-**.

No	Jenis Aset Tetap	Saldo	TA 2023			Saldo
		1 Januari 2023	Belanja Modal/Beban Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Desember 2023
1	Tanah	4.721.250.000,00	-	-	-	4.721.250.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.109.677.959,00	278.333.000,00	173.800.000,00	1.318.919.155,00	11.242.891.804,00
3	Gedung dan Bangunan	6.237.163.621,00	-	-	-	6.237.163.621,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	257.328.500,00	-	-	-	257.328.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.650.000,00	-	-	-	1.650.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.620.000,00	-	-	-	59.620.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.408.513.476,04)	(1.035.800.239,31)	-	(1.116.212.147,57)	(10.328.101.567,78)
Jumlah		12.978.176.603,96	(757.467.239,31)	173.800.000,00	202.707.007,43	12.191.802.357,22

Tanah

30 Desember 2023	30 Desember 2022
4.721.250.000,00	4.721.250.000,00

Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Tanah merupakan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Nilai per 30 Desember 2023 sebesar Rp. 4.721.250.000,00 yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	4.721.250.000,00
Realisasi Belanja Modal TA 2022	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	4.721.250.000,00

Peralatan dan Mesin

30 Desember 2023	30 Desember 2022
11.242.891.804,00	12.109.677.959,00

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Saldo	TA 2023			Saldo
		1 Januari 2023	Belanja Modal/Beban Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Desember 2023
1	Alat Angkutan	6.106.998.509,00	-	-	1.145.119.155,00	4.961.879.354,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.135.038.050,00	7.995.000,00	-	-	2.143.033.050,00
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	803.853.500,00	24.800.000,00	-	24.800.000,00	803.853.500,00
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	72.760.000,00	-	-	-	72.760.000,00
5	Alat Persenjataan	2.178.050.000,00	-	-	-	2.178.050.000,00
6	Komputer	666.729.900,00	96.538.000,00	24.800.000,00	-	788.067.900,00
7	Alat Keselamatan Kerja	64.187.000,00	-	-	-	64.187.000,00
8	Rambu - rambu	82.061.000,00	-	-	-	82.061.000,00
9	Peralatan Olah Raga	-	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00
Jumlah		12.109.677.959,00	278.333.000,00	173.800.000,00	1.318.919.155,00	11.242.891.804,00

a. Alat Angkutan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
4.961.879.354,00	6.106.998.509,00

Alat Angkutan merupakan Nilai Alat - alat Angkutan per 30 Desember 2023 sebesar Rp. 4.961.879.354,00,- yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	6.106.998.509,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp. (719.100.000,00)
Hibah	Rp. (246.194.155,00)
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp. (179.825.000,00)
Saldo Akhir	Rp.	4.961.879.354,00

- *Mutasi Aset Alat Angkutan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Prov Sul Sel berdasarkan Berita Acara Mutasi Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dengan No. 032/4424/BKAD Tanggal 17 April 2023 senilai Rp. 188.200.000,-.*
- *Mutasi Aset Alat Angkutan berupa Kendaraan Bermotor Penumpang ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sul Sel berdasarkan Berita Acara Mutasi Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dengan No. 032/4420/BKAD Tanggal 17 April 2023 senilai Rp. 530.900.000,-.*
- *Hibah Aset Alat Angkutan berupa Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Damkar) ke Pemerintah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan No. 978.3/11230/BKAD dan No. 900.1.1.3/11/BPKD/IX/2023 serta Surat Keputusan Penghapusan No. 1378/XII/SEKDA/Tahun 2023 Tanggal 18 Desember 2023 senilai Rp. 50.587.263,- dan Nilai Akumulasi Penyusutannya sebesar (Rp. 21.680.255,57).*
- *Hibah Aset Alat Angkutan berupa Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Damkar) ke Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan No. 978.3/11570/BKAD dan No. 100.2.1/22/SETDA.PEM/X/2023 serta Surat Keputusan Penghapusan No. 1378/XII/SEKDA/Tahun 2023 Tanggal 18 Desember 2023 senilai Rp. 98.504.246,- dan Nilai Akumulasi Penyusutannya sebesar (Rp. 98.504.246,-).*

- Hibah Aset Alat Angkutan berupa Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Damkar) ke Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan No. 978.3/11574/BKAD dan No. 300.1.2.2/472/SATPOL.PP.DAMKAR&PENYELAMATAN serta Surat Keputusan Penghapusan No. 1378/XII/SEKDA/Tahun 2023 Tanggal 18 Desember 2023 senilai Rp. 97.102.646,- dan Nilai Akumulasi Penyusutannya sebesar (Rp. 97.102.646,-).
- Reklasifikasi Aset berupa Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Kode : 1.3.02.02.01.0001 (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Kendaraan Lelang) berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur No. 024/14276/BKAD Tanggal 20 November 2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 52 Unit senilai Rp. 179.825.000,- dan Nilai Akumulasi Penyusutannya sebesar (Rp. 179.825.000,-).

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga

30 Desember 2023	30 Desember 2022
2.143.033.050,00	2.135.038.050,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan Nilai Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.143.033.050,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	2.135.038.050,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	7.995.000,00
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	2.143.033.050,00

c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

30 Desember 2023	30 Desember 2022
803.853.500,00	803.853.500,00

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 803.853.500,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	803.853.500,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	24.800.000,00
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	(Rp.	24.800.000,00)
Saldo Akhir	Rp.	803.853.500,00

d. Alat Kedokteran dan Kesehatan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
72.760.000,00	72.760.000,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 72.760.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	72.760.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	72.760.000,00

e. Alat Peralatan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
2.178.050.000,00	2.178.050.000,00

Alat Peralatan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.178.050.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	2.178.050.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	2.178.050.000,00

f. Komputer

30 Desember 2023	30 Desember 2022
788.067.900,00	666.729.900,00

Komputer merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 788.067.900,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	666.729.900,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	96.538.000,00
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	24.800.000,00
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	788.067.900,00

- Reklasifikasi Aset berupa Alat Komunikasi Telephone Kode: 1.3.02.06.02.0001 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Validasi No. 032/11846/XII/BKAD Tanggal 27 Desember 2023 ke Personal Komputer Kode: 1.3.02.10.01.0002 Tablet senilai Rp. 24.800.000,-.

g. Alat Keselamatan Kerja

30 Desember 2023	30 Desember 2022
64.187.000,00	64.187.000,00

Alat Keselamatan Kerja merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 64.187.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	64.187.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	64.187.000,00

h. Rambu - rambu

30 Desember 2023	30 Desember 2022
82.061.000,00	82.061.000,00

Rambu - rambu merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 82.061.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	82.061.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	82.061.000,00

i. Peralatan Olah Raga

30 Desember 2023	30 Desember 2022
149.000.000,00	-

Peralatan Olah Raga merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp.149.000.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	-
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	149.000.000,00
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	149.000.000,00
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	(Rp.)	149.000.000,00
Saldo Akhir	Rp.	149.000.000,00

- *Reklasifikasi Aset berupa Peralatan Olah Raga Lainnya Kode 1.3.02.19.01.0006 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Validasi No. 032/11846/XII/BKAD Tanggal 27 Desember 2023 senilai Rp. 149.000.000,- ke Peralatan Senam Kode: 1.3.02.19.01.0004 Alat Olahraga Fitnes.*

Gedung dan Bangunan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
6.237.163.621,00	6.237.163.621,00

Bangunan Gedung merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp.6.237.163.621,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	6.237.163.621,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	6.237.163.621,00

Jalan, Jaringan dan Irigasi

30 Desember 2023	30 Desember 2022
257.328.500,00	257.328.500,00

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Saldo	TA 2023			Saldo
		1 Januari 2023	Belanja Modal/Beban Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Desember 2023
1	Jalan dan Jembatan	49.005.000,00	-	-	-	49.005.000,00
2	Bangunan Air	109.165.000,00	-	-	-	109.165.000,00
3	Instalasi	49.711.500,00	-	-	-	49.711.500,00
4	Jaringan	49.447.000,00	-	-	-	49.447.000,00
Jumlah		257.328.500,00	-	-	-	257.328.500,00

Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 49.005.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	49.005.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	49.005.000,00

Bangunan Air

Bangunan Air merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 109.165.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	109.165.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	109.165.000,00

Instalasi

Instalasi merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 49.711.500,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	49.711.500,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	49.711.500,00

Jaringan

Jaringan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 49.447.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	49.447.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	49.447.000,00

Aset Tetap Lainnya

30 Desember 2023	30 Desember 2022
1.650.000,00	1.650.000,00

Aset Tetap Lainnya mencakup Nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebesar **Rp. 1.650.000,-**.

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga merupakan Nilai Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.650.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	1.650.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	1.650.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
59.620.000,00	59.620.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 59.620.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	59.620.000,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	59.620.000,00

Akumulasi Penyusutan

30 Desember 2023	30 Desember 2022
(10.328.101.567,78)	(10.408.513.476,04)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 10.328.101.567,78)** terdiri dari:

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Saldo	TA 2023			Saldo
		1 Januari 2023	Belanja Modal/Beban Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Desember 2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.375.595.676,45)	(900.573.162,49)	-	(1.116.212.147,57)	(9.159.956.691,37)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(915.165.018,34)	(121.790.343,49)	-	-	(1.036.955.361,83)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(116.102.781,25)	(13.436.733,33)	-	-	(129.539.514,58)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.650.000,00)	-	-	-	(1.650.000,00)
Jumlah		(10.408.513.476,04)	(1.035.800.239,31)	-	(1.116.212.147,57)	(10.328.101.567,78)

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 9.159.956.691,37,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	(Rp.	9.375.595.676,45)
Beban Penyusutan TA 2023	(Rp.	900.573.162,49)
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	(Rp.	719.100.000,00)
Hibah	(Rp.	217.287.147,57)
Reklasifikasi Tahun 2023	(Rp.	179.825.000,00)
Saldo Akhir	(Rp.	9.159.956.691,37)

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 1.036.955.361,83,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	(Rp.	915.165.018,34)
Beban Penyusutan TA 2023	(Rp.	121.790.343,49)
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	(Rp.	1.036.955.361,83)

c. Akumulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 129.539.514,58,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	(Rp.	116.102.781,25)
Beban Penyusutan TA 2023	(Rp.	13.436.733,33)
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	(Rp.	129.539.514,58)

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 1.650.000,00,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	(Rp.	1.650.000,00)
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	(Rp.	1.650.000,00)

3.1.5.3 Aset Lainnya

30 Desember 2023	30 Desember 2022
115.984.166,67	37.413.750,00

Aset Lainnya per 30 Desember 2023 sebesar Rp. 115.984.166,67.

Rinciannya terdiri dari:

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Saldo	TA 2023			Saldo
		1 Januari 2023	Belanja Modal/Beban Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Desember 2023
1	Aset Tidak Berwujud	468.512.500,00	95.000.000,00	-	-	563.512.500,00
2	Aset Lain - lain	-	-	179.825.000,00	-	179.825.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(431.098.750,00)	(16.429.583,33)	(179.825.000,00)	-	(627.353.333,33)
Jumlah		37.413.750,00	78.570.416,67	-	-	115.984.166,67

a. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud berupa Software merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 563.512.500,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	468.512.500,00
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	95.000.000,00
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	563.512.500,00

b. Aset Lain -Lain

Aset Lain – lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 179.825.000,00,-** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	-
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	179.825.000,00
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	Rp.	179.825.000,00

c. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya terdiri dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar **Rp. 627.353.333,33** .
Terdiri dari:

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 447.528.333,33,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	(Rp.	431,098,750.00)
Beban Penyusutan TA 2023	(Rp.	16,429,583.33)
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	(Rp.	447,528,333.33)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain merupakan Nilai per 30 Desember 2023 sebesar **(Rp. 179.825.000,00,-)** yang terdiri dari:

Saldo Awal TA 2023	Rp.	-
Beban Penyusutan TA 2023	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	(Rp.	179,825,000.00)
Mutasi Antar OPD	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Reklasifikasi Tahun 2023	Rp.	-
Saldo Akhir	(Rp.	179,825,000.00)

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Utang Beban

30 Desember 2023	30 Desember 2022
1.148.067.777,00	916.222.679,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo per 30 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.148.067.777,-** dan per 30 Desember 2022 sebesar **Rp. 916.222.679,-** dengan rincian sebagai berikut:

Utang Beban merupakan Nilai Utang Beban per 30 Desember 2023 Terdiri dari:

Saldo Awal 1 Jan 2023	Rp.	916.222.679,00
Pembayaran Utang Beban	(Rp.	916.222.679,00)
Utang Beban TA 2023	Rp.	1.148.067.777,00
Jumlah	Rp.	1.148.067.777,00
Utang Beban TA 2023 terdiri dari:		
Utang Beban Gaji dan Tunjangan	Rp.	1.042.731.541,00
Utang Beban Barang dan Jasa	Rp.	105.336.236,00
Jumlah	Rp.	1.148.067.777,00

(Rincian Terlampir)

3.1.7 EKUITAS DANA

30 Desember 2023	30 Desember 2022
11.066.821.146,89	12.101.712.374,96

Ekuitas Dana merupakan Pos Neraca Pemerintah yang menampung selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah. Adapun Nilai Ekuitas Dana per 30 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 11.066.821.146,89** yang terdiri dari:

Ekuitas	(Rp.	38.817.301.587,68)
RK PPKD	Rp.	49.884.122.734,57
Jumlah Ekuitas	Rp.	11.066.821.146,89

Ekuitas dan Kewajiban

Nilai Ekuitas dan Kewajiban per 30 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 12.758.062.391,67** yang terdiri dari:

Ekuitas	Rp.	11.066.821.146,89
Kewajiban	Rp.	1.148.067.777,00
Ekuitas dan Kewajiban	Rp.	12.214.888.923,89

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

3.2.1 Persediaan

Pada Persediaan menggunakan pendekatan perpetual sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

3.2.2 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

Utang beban timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pemakaian jasa yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

I. Pendapatan

Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, direncanakan sebesar **Rp. 19.620.000,00,-** dapat direalisasi sebesar **Rp. 21.325.900,00,-** atau **108,69 %** memenuhi target pagu pendapatan.

II. Belanja

Anggaran Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, direncanakan sebesar **Rp. 50.781.622.592,00,-** dapat direalisasi sebesar **Rp. 49.839.355.842,00,-** atau **98,14 %**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 942.266.750,00,-**.

Belanja tersebut dapat diuraikan menurut bagian Belanja sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi, direncanakan sebesar **Rp. 50.468.466.592,00,-** dapat direalisasi sebesar **Rp. 49.561.022.842,00,-** atau **98,20 %**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 907.443.750,00,-**.

B. Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan sebesar **Rp.313.156.000,00,-** dapat direalisasi sebesar **Rp. 278.333.000,00,-** atau **88,88 %**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 34.823.000,00,-**. Belanja tersebut diuraikan dalam masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tabel berikut:

NO	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
A.	PENDAPATAN DAERAH	100,00	19.200.000,00	100,00	21.325.900,00	100,00	111,07
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,00	19.200.000,00	100,00	21.325.900,00	100,00	111,07
1.1	RETRIBUSI DAERAH	100,00	19.200.000,00	100,00	21.325.900,00	100,00	111,07
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 21.325.900,00					
	Keluaran	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah tepat waktu					
	Hasil	Tersedianya Asrama Pegawai dan Rumah Dinas untuk SatpolPP					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Asrama Pegawai dan Sewa Rumah Dinas	19.200.000,00	Sewa Asrama Pegawai dan Sewa Rumah Dinas	21.325.900,00	100,00	111,07
Pendapatan telah melebihi target dikarenakan Semua Penghuni Asrama telah melunasi pembayaran untuk Tahun 2023 serta terdapat Denda karena keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 142.400,-							
B.	BELANJA DAERAH	100,00	50.781.622.592,00	100,00	49.934.355.842,00	100,00	98,33
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00	45.695.557.942,00	100,00	45.170.866.784,00	100,00	98,85
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	301.023.700,00	100,00	272.310.832,00	100,00	90,46
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 272.310.832,00					
	Keluaran	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu					
	Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	214.158.700,00	4 Dokumen	197.310.425,00	100,00	92,13
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	7.960.500,00	1 Dokumen	7.960.500,00	100,00	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.461.200,00	1 Dokumen	7.190.200,00	100,00	49,72
Adanya efisiensi Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pelaksanaan rapat dilaksanakan secara zoom meeting							
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.172.500,00	1 Dokumen	11.172.500,00	100,00	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	31.845.900,00	1 Dokumen	28.175.507,00	100,00	88,47
Adanya efisiensi Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pelaksanaan rapat dilaksanakan secara zoom meeting							
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.411.200,00	1 Laporan	12.406.500,00	100,00	99,96
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.013.700,00	4 Laporan	8.095.200,00	100,00	89,81
Tersisa Anggaran untuk Belanja Bahan Komputer untuk efisiensi Anggaran							
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	22.450.777.846,00	100,00	22.344.858.124,00	100,00	99,53
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 22.344.858.124,00					
	Keluaran	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					
	Hasil	Tersedianya Laporan Keuangan Tepat Waktu					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1944 Orang/Bulan	22.365.721.246,00	1944 Orang/Bulan	22.263.314.243,00	100,00	99,54
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	47.248.800,00	12 Dokumen	45.382.458,00	100,00	96,05
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.378.800,00	1 Laporan	10.275.523,00	100,00	99,00
1.2.4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20 Dokumen	4.616.200,00	20 Dokumen	4.616.200,00	100,00	100,00
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	22.812.800,00	18 Laporan	21.269.700,00	100,00	93,24
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	23.687.500,00	100,00	17.021.350,00	100,00	71,86
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 17.021.350,00					
	Keluaran	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Hasil	Tersedianya Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	11.800.500,00	2 Dokumen	9.981.950,00	100,00	84,59
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% namun masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	11.887.000,00	3 Laporan	7.039.400,00	100,00	59,22
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% namun masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Bahan Cetak							
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	228.494.850,00	100,00	207.417.665,00	100,00	90,78
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 207.417.665,00					
	Keluaran	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					
	Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Paket	207.040.000,00	150 Paket	190.904.965,00	100,00	92,21
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Dokumen	21.454.850,00	340 Dokumen	16.512.700,00	100,00	76,96
Adanya sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang tidak dilaksanakan dikarenakan mengefisienkan anggaran							

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	666.779.450,00	100,00	644.864.374,00	100,00	96,71
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 644.864.374,00					
	Keluaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor					
	Hasil	Tersedianya pemenuhan administrasi umum kantor					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Paket	13.996.250,00	50 Paket	10.580.250,00	100,00	75,59
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100%						
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250 Paket	8.313.000,00	250 Paket	6.172.000,00	100,00	74,25
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100%						
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18000 Paket	19.675.000,00	18000 Paket	16.220.000,00	100,00	82,44
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% walaupun masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai						
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	15.728.000,00	12 Dokumen	14.520.000,00	100,00	92,32
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.955.000,00	12 Laporan	19.503.500,00	100,00	97,74
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	485.578.200,00	100 Laporan	474.334.624,00	100,00	97,68
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	3.534.000,00	5000 Dokumen	3.534.000,00	100,00	100,00
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	100,00	100,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	993.295.968,00	100,00	890.119.058,00	100,00	89,61
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 890.119.058,00					
	Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Hasil	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah Perangkat Daerah					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	330.139.968,00	2 Unit	262.616.058,00	100,00	79,55
	Belanja Sewa Kendaraan Dinas (Dokumen SP) dan SP2D lengkap) tidak terbayarkan disebabkan tidak tersedianya dana di kas daerah sehingga akan diakui sebagai utang tahun 2023						
1.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	349.170.000,00	100,00	99,76
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	313.156.000,00	8 Unit	278.333.000,00	100,00	88,88
	Adanya Belanja Modal Personal Computer yang tidak dilakukan Pengadaan dikarenakan SPD tidak terbit						
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	20.295.818.128,00	100,00	20.295.818.104,00	100,00	99,69
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 20.295.818.104,00					
	Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Hasil	Tersedianya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	17.772.000,00	12 Laporan	12.544.571,00	100,00	70,59
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100%						
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	20.340.510.128,00	12 Laporan	20.283.273.533,00	100,00	99,72
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	673.216.500,00	100,00	498.457.277,00	100,00	74,04
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 498.457.277,00					
	Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik					
	Hasil	Tersedianya barang milik daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	413.470.000,00	25 Unit	279.100.500,00	100,00	67,50
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% namun sisa Anggaran tidak dipakai dikarenakan adanya Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terdapat beberapa Nomenklatur Belanja yang melebihi Perpres Indonesia Nomor 33 Tahun 2020						
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	242.996.500,00	9 Unit	203.126.777,00	100,00	83,59
	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% namun sisa Anggaran tidak dipakai dikarenakan adanya Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terdapat beberapa Nomenklatur Belanja yang melebihi Perpres Indonesia Nomor 33 Tahun 2020						
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 unit	16.750.000,00	41 unit	16.230.000,00	100,00	96,90
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	4.787.033.050,00	100,00	4.525.973.606,00	100,00	94,55
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertibn Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,00	4.063.367.450,00	100,00	3.870.834.333,00	100,00	95,26
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 3.870.834.333,00					
	Keluaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM / Prioritas)					
	Hasil	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertibn Umum)					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertibn Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	277 Kasus	671.451.900,00	277 Kasus	654.776.144,00	100,00	97,52
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertibn Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasu dan Kerusuhan Massa	42 Kasus	649.539.800,00	42 Kasus	511.999.760,00	100,00	78,83
	Adanya Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang tidak sepenuhnya digunakan karena Tidak dilakukannya Kegiatan Penerbitan						
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Dokumen	2.030.382.850,00	15 Dokumen	2.007.095.991,00	100,00	98,85
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertibn Umum	50 Dokumen	36.562.100,00	50 Dokumen	34.306.100,00	100,00	93,83
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berruasi Hak Asasi Manusia	3840 Orang	675.430.800,00	3840 Orang	662.656.338,00	100,00	98,11

2.2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100,00	649.606.900,00	100,00	590.053.322,00	100,00	90,83
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 590.053.322,00					
	Keluaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM / Prioritas)					
	Hasil	Meningkatnya Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	241.500.500,00	3 Laporan	226.521.712,00	100,00	93,80
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	350.643.400,00	65 Laporan	327.027.535,00	100,00	93,26
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	25 Laporan	57.463.000,00	25 Laporan	36.504.075,00	100,00	63,53
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100% walaupun masih terdapat sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100,00	74.058.700,00	100,00	65.085.951,00	100,00	87,88
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 65.085.951,00					
	Keluaran	Persentase Peserta Bimtek PPNS					
	Hasil	Meningkatnya pengetahuan Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.3.1	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	25 Laporan	74.058.700,00	25 Laporan	65.085.951,00	100,00	87,88
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100,00	214.688.000,00	100,00	201.084.621,00	100,00	93,66
3.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100,00	37.418.500,00	100,00	33.405.900,00	100,00	89,28
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 33.405.900,00					
	Keluaran	Persentase Korban Bencana yang tertangani					
	Hasil	Tersedianya Dokumen Resiko Bencana					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
3.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	80 Orang	37.418.500,00	80 Orang	33.405.900,00	100,00	89,28
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100%							
3.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00	40.760.100,00	100,00	39.265.000,00	100,00	96,33
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 39.265.000,00					
	Keluaran	Persentase Korban Bencana yang tertangani					
	Hasil	Tersedianya Dokumen Resiko Bencana					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
3.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	40.760.100,00	100 Orang	39.265.000,00	100,00	96,33
3.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,00	136.509.400,00	100,00	128.413.721,00	100,00	94,07
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 128.413.721,00					
	Keluaran	Persentase Korban Bencana yang tertangani					
	Hasil	Tersedianya Dokumen Resiko Bencana					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
3.3.1	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	136.509.400,00	2 Dokumen	128.413.721,00	100,00	94,07
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,00	84.343.600,00	100,00	36.430.831,00	100,00	43,19
4.1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100,00	59.786.750,00	100,00	34.647.781,00	100,00	57,95
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 34.647.781,00					
	Keluaran	Persentase Korban Bencana yang tertangani					
	Hasil	Tersedianya Dokumen Resiko Bencana					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
4.1.1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80 Orang	22.781.400,00	80 Orang	20.321.031,00	100,00	89,20
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana secara 100%							
4.1.2	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten Kota	100 Orang	37.005.350,00	100 Orang	14.326.750,00	101,00	38,72
Adanya Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Honorarium narasumber yang tidak terpakai dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan							
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00	24.556.850,00	100,00	1.783.050,00	100,00	7,26
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 1.783.050,00					
	Keluaran	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran					
	Hasil	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman dalam Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
4.2.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	24.556.850,00	2 Laporan	1.783.050,00	100,00	7,26
Adanya Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Honorarium narasumber yang tidak terpakai dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan							

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan adalah :

1. Dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian para staf pelaksana/pengelola Administrasi Keuangan agar pada pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar baik dan benar.
2. Pelaksanaan kegiatan secara umum dapat terlaksana namun terkesan lambat karena adanya pembatasan penerbitan Surat Penyediaan Dana yang tidak sesuai dengan Anggaran Kas.

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Prov. Sul Sel dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas:

- 1.1 Laporan Realisasi Anggaran;
- 1.2 Neraca;
- 1.3 Laporan Operasional;
- 1.4 Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- 1.5 Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefenisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

1.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi.
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan Koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan Informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2010 tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampiannya.
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 46 Tahun 2021 Tgl. 6 Desember 2021 tentang Pemetaan Permendagri Nomor : 108 Tahun 2016;
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 35);
- p. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 / I / Tahun 2020 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
- q. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2486 / XI / Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II : Berisi Ikhtisar Indikator pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator pencapaian target kinerja keuangan yang terdiri dari Indikator makro pembangunan dan Indikator bidang- bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan

BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara ringkas tentang Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Aset dan Kewajiban Lain-lain.

BAB IV : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB V : Penutup